

## **Kewirausahaan Komprehensif (Material-Spiritual) Dalam Percepatan Penurunan Kemiskinan di Jawa Barat**

Oleh:

**Ade Yunita Mafruhat<sup>1</sup>, Noviani<sup>2</sup>**

**<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Bandung (Unisba)**

***E-mail:* <sup>1</sup>dnita90@gmail.com <sup>2</sup>noviani\_tanjung@yahoo.co.id**

### **ABSTRAK**

Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep kewirausahaan yang sesuai yang memasukkan aspek material dan spiritual dalam percepatan penurunan kemiskinan khususnya di wilayah Jawa Barat. Kemiskinan menjadi masalah utama berbagai negara di dunia. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi agenda utama tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) dunia termasuk Indonesia. Di Jawa Barat, salah satu upaya dalam mempercepat penurunan kemiskinan yakni dengan mencanangkan kewirausahaan pada generasi muda. Persoalannya, apakah dengan dicanangkannya kewirausahaan pada generasi muda dapat menjadi solusi terbaik dalam mempercepat menurunkan kemiskinan? Jika iya, konsep kewirausahaan yang bagaimanakah yang dapat mempercepat menurunkan kemiskinan? Apakah hanya cukup dengan konsep kewirausahaan yang hanya mengedepankan aspek material saja tanpa memasukan aspek spiritual di dalamnya ataukah konsep kewirausahaan yang memasukan kedua aspek tersebut? Artikel ini mencoba menjawab persoalan-persoalan tersebut. Berdasarkan kajian kepustakaan diperoleh bahwa dalam percepatan penurunan kemiskinan, konsep yang perlu dicanangkan ialah konsep kewirausahaan yang memasukan kedua aspek yakni aspek material dan aspek spiritual.

Kata Kunci: kewirausahaan, komprehensif, kemiskinan

### **ABSTRACT**

*This article aims to identify an appropriate entrepreneurship concept that incorporates material and spiritual aspects in the acceleration of poverty reduction especially in West Java. Poverty is the main problem of many countries in the world. Therefore, poverty is the main agenda of sustainable development goals (SDG's) of the world including Indonesia. In West Java, one of the efforts in accelerating poverty reduction is by declaring entrepreneurship in the younger generation. The problem, whether by the declaration of entrepreneurship in the younger generation can be the best solution in accelerating poverty reduction? If so, what concepts of entrepreneurship can accelerate poverty reduction? Is it just enough with the concept of entrepreneurship that only prioritizes the material aspect only without including the spiritual aspect in it or the entrepreneurial concept that includes both aspects? This article tries to answer these issues. Based on the literature review it is found that in the acceleration of poverty reduction, the concept that needs to be proclaimed is the concept of entrepreneurship which includes both aspects of material and spiritual aspects.*

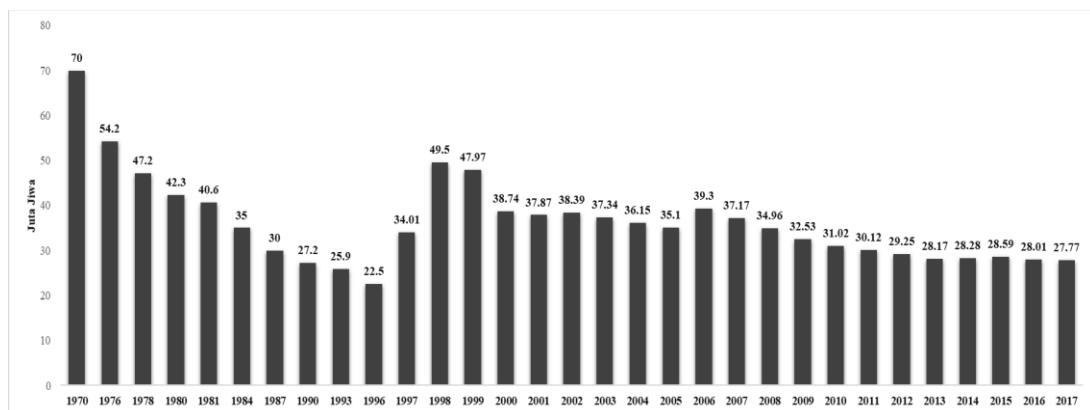
*Keyword: Entrepreneurship, Comprehensive, Poverty*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan fenomena global dan termasuk masalah krusial yang terjadi di setiap negara dunia termasuk di Indonesia (Mustika, 2011; Kertati, 2013). Krusialnya masalah kemiskinan ini terlihat dari prioritas pertama tujuan pembangunan berkelanjutan dunia atau dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDG'S) yakni pengentasan kemiskinan menjadi *zero* kemiskinan pada tahun 2030.

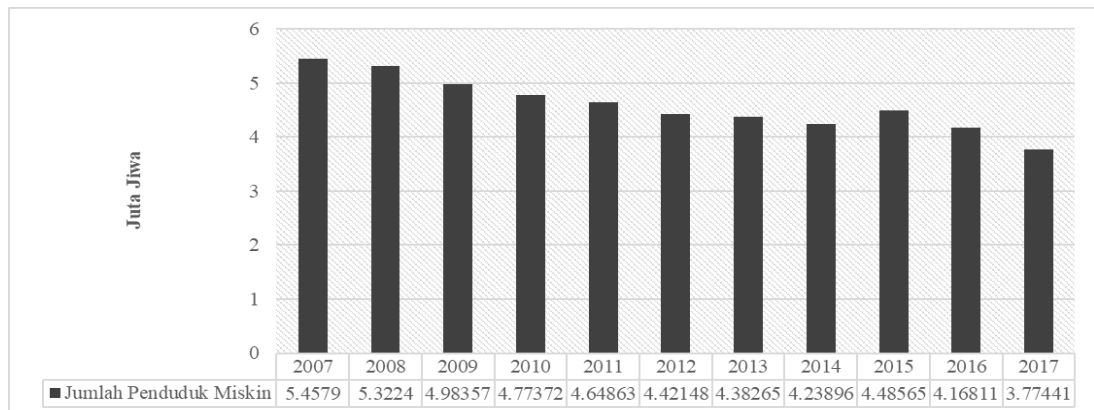
Berdasarkan data BPS tercatat bahwa kemiskinan di Indonesia selama 47 tahun yakni pada periode 1970-2017 terus berfluktuatif, namun cenderung mengalami penurunan yakni dari 70 juta jiwa pada tahun 1970 menjadi 27 juta jiwa pada tahun 2017. Walaupun demikian, pada jangka waktu 1997-1999 yakni ketika terjadi krisis moneter kemiskinan Indonesia kembali mengalami peningkatan pada kisaran 30 juta sampai dengan 40 juta. Sementara pada periode sebelumnya yakni pada tahun 1996, kemiskinan Indonesia berhasil turun pada kisaran angka 20 juta. Kemudian kemiskinan Indonesia terjadi penurunan kembali pada periode 2000-2010. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penduduk miskin Indonesia terus mengalami penurunan. Untuk lebih jelasnya terkait perkembangan kemiskinan di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Sumber: BPS Indonesia, 2017

**Gambar 1.1. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 1970-2017 (Juta Jiwa)**

Salah satu provinsi yang berkontribusi besar terhadap kemiskinan di Indonesia ialah Jawa Barat. Jawa Barat memiliki jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 sebesar 3.77 juta jiwa (BPS Indonesia, 2017). Hal ini disebabkan Jawa Barat memiliki daya tarik sebagai wilayah urban karena posisi Jawa Barat yang berdekatan dengan Ibu kota Jakarta. Untuk lebih jelasnya terkait perkembangan jumlah penduduk miskin Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut.



Sumber: BPS Jawa Barat, 2017

**Gambar 1.2. Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Barat Tahun 2007-2017 (Juta Jiwa)**

Berdasarkan Gambar 1.2 jumlah penduduk miskin Jawa Barat tahun 2007-2017 secara keseluruhan memiliki tren terus mengalami penurunan rata-rata sebesar 16.83 persen per tahun walaupun pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin naik sebesar 24.67 persen. Dengan terus menurunnya jumlah penduduk miskin Jawa Barat maka upaya yang diperlukan Jawa Barat pada tahap selanjutnya ialah upaya-upaya percepatan penurunan kemiskinan. Salah satu upaya yang dicanangkan Pemerintah Jawa Barat ialah program kewirausahaan ([Jabarprov.go.id](http://Jabarprov.go.id)). Program kewirausahaan ini dicanangkan oleh Pemerintah Jawa Barat karena terbukti memberikan dampak positif dalam menurunkan kemiskinan Jawa Barat.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Pada dasarnya program pencanangan kewirausahaan oleh pemerintah Jawa Barat bertujuan untuk memperluas pengembangan usaha untuk mengelola sumber daya alam (SDA). Hal ini dipandang penting karena Pemerintah Jawa Barat memandang salah satu penyebab kemiskinan di Indonesia yakni karena adanya ketimpangan pengelolaan SDA sehingga berdampak pada kurangnya pemerataan dalam pengelolaan SDA ([Jabarprov.go.id](http://Jabarprov.go.id)).

Berdasarkan hasil sensus ekonomi tahun 2016 diperoleh data bahwa jumlah usaha yang berkembang di Jawa Barat merupakan jumlah usaha tertinggi di Indonesia yakni sebesar 4,676,000 unit usaha pada SE2016. Jika dibandingkan jumlah usaha hasil sensus ekonomi tahun 2006, jumlah unit usaha di Jawa Barat ternyata telah mengalami peningkatan sebesar 10.9 persen atau rata-rata setiap tahunnya jumlah usaha di Jawa Barat meningkat sebesar 1 persen. Selain itu *Entrepreneurship Ratio* Jawa Barat cukup besar yakni 9.87 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari 46,709,600 penduduk Jawa Barat (tahun 2015) terdapat sekitar 4,568,198.88 entrepreneur di Jawa Barat. Namun, Dari 4.63 juta usaha/perusahaan non pertanian, 4.56 juta usaha/perusahaan (98.49 persen) berskala Usaha Mikro Kecil (UMK) dan 0.07 juta usaha/perusahaan (1.51 persen)

berskala Usaha Menengah Besar (UMB). Sementara itu dominasi lokasi usaha, lebih dominan lokasi usaha (72.48 persen) yang tidak menempati bangunan khusus usaha seperti pedagang keliling, usaha di dalam rumah tempat tinggal, usaha kaki lima, dan lain sebagainya.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa walaupun Jawa Barat merupakan provinsi yang berhasil mencanangkan program kewirausahaan dengan memiliki jumlah *entrepreneur* yang tinggi namun sayangnya *entrepreneur* tersebut masih didominasi oleh pelaku UMK. Dimana UMK masih memiliki permasalahan yang menghambat dalam meningkatkan pendapatannya diantaranya masalah penciptaan modal, pembentukan mental dan penciptaan inovasi. Jika program kewirausahaan diharapkan untuk dapat mempercepat penurunan kemiskinan, maka konsep kewirausahaan yang digunakan perlu didasarkan pada konsep kemiskinan itu sendiri. Menurut Ahmed (2004), Korayem dan Mashhour (2014), Mafruh et. al (2016) menyebutkan bahwa kemiskinan itu sendiri perlu dipandang dari dua aspek yakni aspek material (harta) dan aspek spiritual. Oleh karena itu, konsep kewirausahaan yang perlu dikembangkan dan diidentifikasi berdasarkan kasus Jawa Barat ini ialah konsep kewirausahaan yang memperhatikan aspek material dan spiritual sehingga dapat menyelesaikan ketiga masalah yang muncul dalam UMK yang diharapkan dapat mempercepat menurunkan kemiskinan.

Berdasarkan hal tersebut maka artikel ini mencoba untuk mengidentifikasi konsep kewirausahaan yang komprehensif, dimana menggabungkan aspek material dan spiritual. Hal ini dikarenakan spiritual yang baik dapat mempengaruhi dalam pembentukan mental yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi penciptaan inovasi dan penciptaan modal.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah artikel ini ialah bagaimanakah konsep kewirausahaan komprehensif yang dapat mempercepat penurunan kemiskinan di Jawa Barat?

## **II. LANDASAN TEORI**

### **2.1. Kewirausahaan**

Menurut Milla (2013), kewirausahaan dapat dipandang dari dua perspektif; pertama, perspektif konvensional; dan kedua, perspektif Islam. Kewirausahaan dari perspektif konvensional diartikan kemampuan untuk menciptakan usaha baru atau usaha yang berbeda yang dilakukan individu atau kelompok secara mandiri dan inovatif. Sementara itu, kewirausahaan dari perspektif Islam diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan usaha baru atau usaha yang berbeda yang bertujuan tidak hanya untuk mendapatkan materi saja tetapi juga mendapatkan keuntungan

akhirat yakni kegiatan yang dilandasi motivasi untuk beribadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, dalam berwirausaha dalam Islam perlu menghindari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh Islam seperti korupsi, riba, dan menjual produk dan jasa yang haram.

## **2.2. Kemiskinan Dalam Dua Paradigma Pembangunan**

Berdasarkan pustaka yang diperoleh, terdapat dua paradigma mengenai kemiskinan yakni kemiskinan dalam paradigma pembangunan konvensional dan kemiskinan dalam paradigma pembangunan Islam. Kedua paradigma ini memberikan dua definisi yang berbeda mengenai kemiskinan yakni definisi berdasarkan definisi konvensional dan berdasarkan definisi Islam. Pertama berdasarkan definisi konvensional, kemiskinan didefinisikan sebagai standar hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Yasa, 2012). Secara ekonomis, kemiskinan juga dapat diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Kemiskinan memberi gambaran situasi serba kekurangan seperti terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pengetahuan dan keterampilan, rendahnya produktivitas, rendahnya pendapatan, lemahnya nilai tukar hasil produksi orang miskin dan terbatasnya kesempatan berperan serta dalam pembangunan. Kedua berdasarkan definisi Islam, kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang mengalami kekurangan secara spiritual dan material (Saleh, 2013). Kurang secara spiritual berkaitan dengan miskin iman dan ilmu. Sementara kekurangan secara material diartikan sebagai miskin dalam hal harta.

## **2.3. Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan**

Dari sudut pandang ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari beberapa sisi, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi yang timpang. Penduduk miskin memiliki sumber daya terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya tingkat pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan.
3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.
4. Di daerah perkotaan, derasnya arus migran masuk juga memberi dampak terhadap semakin banyaknya penduduk dalam kategori miskin. Perilaku para migran dalam kehidupan kota yang sedemikian rupa, yakni pengeluaran yang serendah-rendahnya di daerah tujuan (kota) agar dapat menabung untuk dapat dibawa pulang ketika mereka mudik ke kampung halaman (daerah asal). Para migran memanfaatkan hanya sebagian kecil pendapatannya mereka untuk pengeluaran di daerah tujuan, disamping memang sebagian besar dari mereka

- berpendapatan rendah karena kualitas sumber daya manusianya juga rendah. Munculnya permukiman kumuh adalah salah satu ciri kemiskinan perkotaan.
5. Di daerah perkotaan, terputusnya akses pengairan di sebagian subak-subak, berdampak pada perubahan perilaku petani. Apabila petani tidak dapat segera mengantisipasi perubahan tersebut, mereka akan kesulitan untuk melakukan aktivitas produktif di pertanian. Optimalisasi lahan yang telah terputus akses pengairannya perlu segera dipolakan agar kemanfaatannya oleh petani dan masyarakat perkotaan dapat dirasakan.

Namun, kemiskinan juga terjadi tidak serta merta disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat ekonomi saja. Kemiskinan terjadi juga disebabkan oleh faktor budaya, sosial, dan politik. Penyebab utama kemiskinan adalah karena kelemahan dari segi modal. Kelemahan modal disebabkan karena ketidakmampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam. Ketidakmampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam berdampak pada rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas berakibat pada rendahnya pendapatan. Pendapatan yang rendah berakibat pada rendahnya tabungan dan insentif. Rendahnya tabungan dan insentif berakibat pula pada rendahnya pembentukan modal. Lingkaran kemiskinan demikian menyisakan variabel lain yaitu variabel sosial, budaya, dan politik. Ketidakmampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam berakar pada rendahnya tingkat pendidikan. Kemudian rendahnya produktifitas berakar pada lemahnya etos kerja. Dan kelemahan etos kerja disebabkan oleh adanya sebuah keyakinan bahwa kemiskinan merupakan takdir Tuhan. Variabel politik terlihat pada keberpihakan yang lebih dari pemerintah terhadap pemilik modal ketimbang kepada kepentingan rakyat. Berdasarkan faktor-faktor yang telah dikemukakan terdapat dua penyebab utama timbulnya kemiskinan. Pertama, berkaitan spiritual. Spiritual berkaitan pemahaman dan motivasi. Kedua, berkaitan material. Material berkaitan dengan sisi ekonomi, politik dan lainnya.

#### **2.4. Kategori Miskin dan Kaya dalam pandangan Islam**

Berdasarkan definisi kemiskinan menurut Islam terdapat empat kategori miskin dan kaya berdasarkan kondisi spiritual/jiwa dan kondisi material/kesejahteraan yang dikemukakan oleh Saleh (2013). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1. Kategori Miskin dan Kaya berdasarkan kondisi Spiritual/jiwa dan material/kesejahteraan**

<b>Kategori</b>	<b>Jiwa</b>	<b>Kesejahteraan</b>	<b>Keterangan</b>
1	Kaya	Kaya	Kategori yang sesuai harapan termasuk kategori kaya.
2	Kaya	Miskin	Kategori ini dapat dibiarkan mengikuti pilihannya selama dia tidak membebani negara dan masyarakat sekitarnya.
3	Miskin	Miskin	Kategori yang paling tidak diharapkan keberadaannya. Kategori ini perlu dibantu pemerintah dalam kedua aspek yakni pembinaan jiwa dan kesejahteraannya.
4	Miskin	Kaya	Kategori ini sama dengan kategori ketiga yaitu kategori yang paling tidak diharapkan. Pemerintah pun perlu mengalokasikan bantuan dalam bentuk pembinaan jiwanya supaya kategori ini tidak berbuat sewenang-wenang karena miskinnya jiwa mereka.

Sumber: Saleh (2013)

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa berdasarkan spiritual/jiwa dan material/kesejahteraan terdapat empat kategori. Pertama, kaya spiritual dan material. Kedua, kaya spiritual tetapi miskin material. Ketiga, miskin spiritual dan miskin material. Keempat, miskin spiritual tetapi kaya material. Dari empat kategori ini yang disebut miskin adalah kategori ketiga dan keempat. Hal ini karena ketika seseorang miskin secara spiritual maka akan membawa dampak negatif yakni melakukan tindak kejahatan dan berbuat sewenang-wenang. Sebaliknya, ketika spiritual kaya walaupun secara material miskin, tindakan yang tidak diharapkan masih dapat dihindarkan. Oleh karena itu, kategori kedua masih dapat dibiarkan keberadaannya. Namun, kategori ketiga dan keempat justru perlu perhatian khusus karena apabila dibiarkan dapat menghambat pembangunan itu sendiri. Orang yang miskin dalam keduanya (spiritual dan material) dapat melakukan tindakan kriminal seperti merampok, mencuri dan tindakan kriminal lainnya. Sementara itu yang miskin hanya secara spiritualnya saja dapat melakukan tindakan korupsi.

### **III. PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil kajian kepustakaan, penelitian terkait kewirausahaan terbagi kepada lima bagian: pendidikan kewirausahaan, budaya berwirausaha, peranan lembaga dalam mendorong kewirausahaan, kewirausahaan keluarga serta pelaksanaan kewirausahaan sosial. Penelitian terkait pendidikan kewirausahaan

diantaranya dilakukan oleh Milla (2013), Khumairo (2015), Islam et. al (2015), Fadhlurrahman (2017), dan Wekke (2017). Kedua, penelitian terkait budaya berwirausaha dilakukan oleh Nugroho et. al (2016). Ketiga, penelitian terkait peranan lembaga dalam mendorong kewirausahaan dilakukan oleh Siregar (2015). Keempat, penelitian terkait kewirausahaan keluarga yang dilakukan oleh Marwanti dan Astuti (2012). Kelima, penelitian terkait kewirausahaan sosial yang dilakukan oleh Reginald & Mawardi (2014).

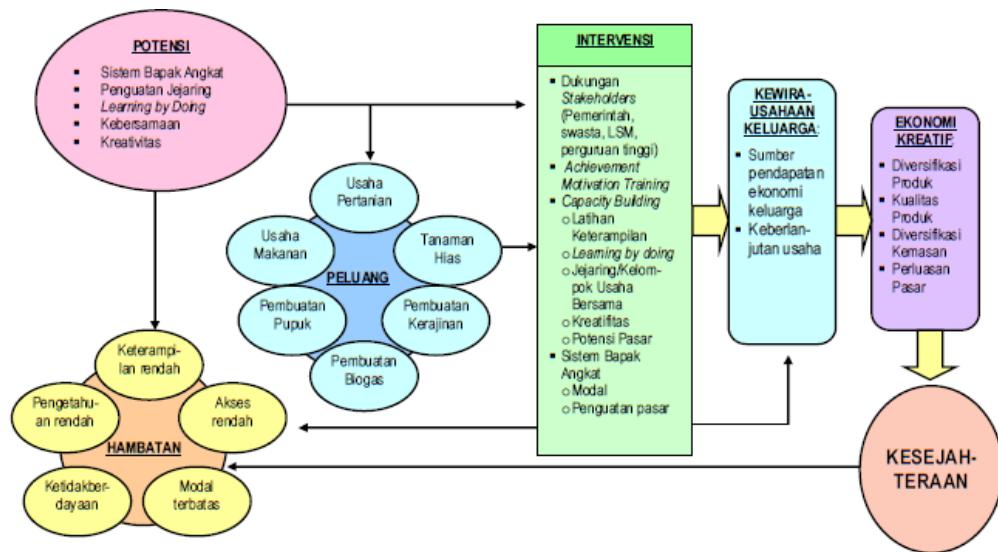
Pada perkembangannya, kewirausahaan dapat dibedakan menjadi dua; pertama, kewirausahaan sosial; kedua, kewirausahaan non-sosial. Menurut, Reginald & Mawardi (2014), kewirausahaan sosial merupakan kegiatan berwirausaha yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat dan bukan semata-mata untuk mencari keuntungan saja yang mana karakteristik kewirausahaan sosial diantaranya yakni penciptaan *social value, innovation, civil society*, dan adanya *economic activity*. Sebaliknya kewirausahaan non-sosial ialah kegiatan berwirausaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan saja. Berdasarkan pemahaman ini maka kewirausahaan pun dianggap sebagai solusi dalam mengatasi masalah ekonomi bangsa. Pentingnya kewirausahaan ini menjadikan pendidikan kewirausahaan sebagai pendidikan wajib yang perlu dimasukkan dalam kurikulum perguruan tinggi. Menurut Milla (2013), mahasiswa yang mempelajari Pendidikan Kewirausahaan diharapkan agar mereka dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memutus rantai kemiskinan. Apabila kemampuan berwirausaha dapat diterapkan oleh mahasiswa, maka diharapkan ketika mahasiswa selesai dalam pendidikannya, mereka tidak perlu lagi untuk mencari pekerjaan, namun mereka menciptakan sendiri lapangan pekerjaan itu dengan modal kejujuran, disiplin, kreatif, inovatif dan berani mengambil resiko. Dalam pendidikan kewirausahaan ini juga menurut Khumairo (2015) perlu disertakan adanya bimbingan karir yang meliputi perencanaan, pelaksanaan (layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, dukungan sistem), dan evaluasi. Menurut beliau juga, pentingnya bimbingan karir ini disebabkan karena sudah terbukti adanya dampak positif bagi siswa Pesantren Adh-Dhuha Bantul Yogyakarta. Dampak positif yang dimaksud ialah berupa peningkatan segi kognitif, afektif dan psikomotorik yakni dengan tertanamnya nilai-nilai kejujuran, tanggungjawab, kerja keras, disiplin, mandiri dan enerjik. Sementara itu, terkait nilai-nilai kewirausahaan menurut Al-Quran yang perlu diterapkan dalam pendidikan kewirausahaan yakni mandiri, kreatif, berani mengambil resiko, berorientasi pada tindakan, kepemimpinan, kerja keras, disiplin, inovatif, tanggung jawab, kerja sama, pantang menyerah, komitmen, tingginya rasa ingin tahu, komunikatif, memiliki motivasi yang kuat untuk sukses (Fadhlurrahman, 2017). Menurut Wekke (2017), pendidikan kewirausahaan juga tidak hanya semata-mata penyampaian materi tetapi juga perlu adanya program pendidikan aplikasi teori kewirausahaan (Wekke, 2017). Dalam penelitiannya juga beliau menyatakan bahwa pendidikan kewirausahaan akan berhasil menciptakan *entrepreneur* baru dengan tiga syarat: pertama, pendidikan kewirausahaan disesuaikan dengan minat siswa dan potensi SDA lingkungan sekitar; kedua, perlunya kerja sama antar elemen yakni kerja sama antara elemen dalam perguruan tinggi maupun perguruan



tinggi dengan masyarakat atau lingkungan sekitar. Islam et. al (2015) menyatakan bahwa pendidikan kewirausahaan akan berhasil jika pendidikan tersebut dikelola dengan baik. Pengelolaan yang perlu dilakukan oleh perguruan tinggi ialah perencanaan pendidikan kewirausahaan yang matang dibuktikan dengan adanya silabus dan rencana kegiatan studi yang jelas dan tersusun; perlu adanya pengajar profesional dalam menyampaikan kewirausahaan dan membimbingnya sampai mahasiswa tersebut dapat secara mandiri dan inovatif menciptakan usaha yang baru dan berbeda; perlunya integrasi pendidikan kewirausahaan dengan organisasi kemahasiswaan atau masyarakat sekitar; pentingnya pelaksanaan kewirausahaan; pelaksanaan evaluasi secara insidental dan rutin.

Ketika pendidikan kewirausahaan menjadi fokus pertama dalam pengembangan kewirausahaan pada generasi muda, maka model budaya kewirausahaan yang perlu dikembangkan menurut Nugroho et. al (2016) ialah kewirausahaan yang dilandasi pada nilai-nilai kewirausahaan Islam, tanggung jawab sosial Islami dan kearifan budaya lokal. Beliau menyatakan bahwa kewirausahaan yang dilandasi ketiga komponen tersebut dapat meningkatkan kinerja usaha. Hal ini menunjukkan bahwa kewirausahaan dapat dipengaruhi oleh aspek spiritual. Oleh karenanya menurut Siregar (2015), Bank Syariah memiliki peranan penting dalam pengembangan kewirausahaan. Hal ini karena konsep yang ditawarkan Bank Syariah sesuai dengan kewirausahaan yang melibatkan aspek material dan spiritual yang dilandasi nilai-nilai Islam. Bank Syariah memiliki konsep bantuan yang diberikan tanpa jaminan atau penjamin, target kelompok adalah masyarakat kecil miskin yang kurang mampu yang mempunyai potensi untuk mengembangkan usaha perekonomiannya serta ketentuan lain yang juga diterapkan adalah jika anggota meninggal dunia, mereka dibebaskan dari pembayaran kredit. Konsep tersebut dapat menjadi daya tarik masyarakat untuk berwirausaha.

Pada pelaksanaan berwirausaha individu dapat melaksanakan wirausaha non sosial termasuk didalamnya wirausaha keluarga maupun wirausaha sosial. Di Pedesaan kemiskinan didominasi oleh perempuan, menurut Marwanti dan Astuti (2012), upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya yakni dengan pemberdayaan perempuan miskin tersebut melalui pengembangan model kewirausahaan keluarga. Model yang diusulkan adalah *pro-poor capacity improvement model* (PCIM), dapat dilihat pada Gambar 3.1.



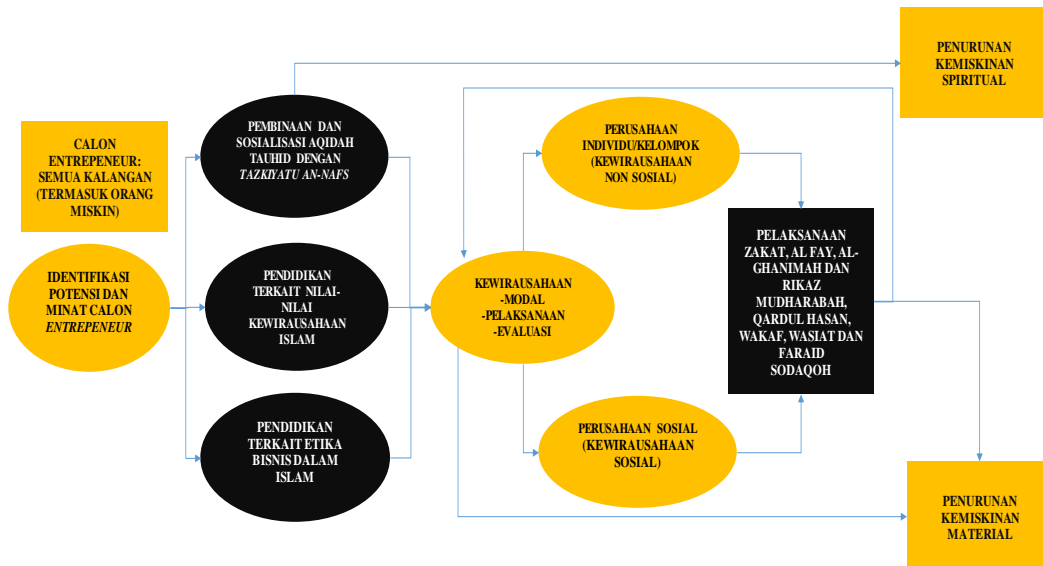
Sumber: Marwanti dan Astuti (2012)

**Gambar 3.1. Model pro-poor capacity improvement model (PCIM)**

Berdasarkan model PCIM tersebut, pemberdayaan yang dapat dilakukan yakni melalui: (1) adanya dukungan seluruh *stakeholders* (baik pemerintah, swasta, LSM maupun Perguruan Tinggi); (2) Adanya *Achievement Motivation Training* untuk menumbuhkan kesadaran (keberdayaan) akan pentingnya mengembangkan kewirausahaan keluarga menuju ekonomi kreatif; (3) Pemantapan jejaring antar sesama perempuan miskin pelaku usaha serta pengusaha lokal sebagai media *learning by doing*; (4) Pembentukan kelompok-kelompok usaha bersama atas dasar kesamaan jenis usaha; (5) Pengembangan kreativitas melalui *capacity building* agar produk yang dihasilkan menarik bagi pembeli dan sesuai selera pasar dan memperhitungkan potensi pasar; (7) Perluasan Sistem Bapak Angkat dengan melibatkan sebanyak mungkin usahawan lokal sehingga dapat memperkuat modal usaha dan pasar bagi perempuan miskin pelaku usaha.

Disamping dengan pemberdayaan perempuan miskin, hal lain yang dapat dilakukan dalam penurunan kemiskinan ialah dengan kewirausahaan sosial (Reginald & Mawardi, 2014). Menurut beliau kewirausahaan sosial dapat dilakukan dengan inovasi pembentukan lembaga wirausaha sosial milik internal seperti *Baitul mal watamwil* (BMT), koperasi dan lembaga sosial lainnya. Lembaga tersebut diharapkan dapat memberikan *social value* seperti kemudahan pemenuhan kebutuhan pokok internal dan eksternal lembaga, kemudahan pembiayaan berbasis syariah, pelatihan, konsultasi dan pemberdayaan masyarakat sekitar dalam berwirausaha, atau dalam keperluan tolong-menolong lainnya seperti pemberian *zakat, infaq, sodaqoh, wakaf*, beasiswa santri, *bisyaroh* dan asuransi kesehatan serta bagi hasil SHU (sisa hasil usaha) yang sebagiannya untuk dana sosial sebagai pemasukan atau penyokong biaya operasional lembaga.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut maka kewirausahaan komprehensif yakni kewirausahaan yang melibatkan aspek spiritual dan aspek material dapat menjadi solusi tepat untuk mempercepat penurunan kemiskinan di Jawa Barat yang masih didominasi oleh kewirausahaan UMK. Menurut Mafruhah et.al (2016), dalam mengentaskan kemiskinan terdapat dua solusi yakni mengantaskan kemiskinan spiritual dan kemiskinan material. Solusi pengentasan kemiskinan spiritual yakni dengan pembinaan akidah Tauhid dan *tazkiyatun nafs*. Sementara, pengentasan kemiskinan material dengan tiga kaedah pengelolaan kemiskinan material menurut Islam; pelaksanaan kaedah wajib, pelaksanaan kaedah wajib *aradhi* dan pelaksanaan kaedah sunah. pelaksanaan kaedah wajib yang meliputi pelaksanaan zakat, *al fay*, *al-ghanimah* dan *rikaz*. Kedua, pelaksanaan kaedah wajib *aradhi* yang meliputi pelaksanaan *mudharabah*, *qardul hasan*, wakaf, wasiat dan faraid. Ketiga, pelaksanaan kaedah sunah dengan dengan *sodaqah*. Ketika kewirausahaan ditujukan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan maka hal yang perlu dilakukan ialah kewirausahaan tersebut juga perlu bersifat komprehensif supaya wirausaha yang berjalan berkelanjutan. Kewirausahaan komprehensif yang dimaksud ialah *entrepreneur* yang dibangun perlu mendapatkan pendidikan kewirausahaan Islam yang didalamnya terdapat pembinaan aqidah Tauhid dan *tazkiyatun an-nafs* (penyucian jiwa) yang meliputi pemahaman Tauhid *Rububiyah/al-Hakimiyyah*, Tauhid *Mulkiyyah/al-Asmâ' wa al-sifat* dan Tauhid *Uluhiyyah*. Untuk lebih jelasnya kewirausahaan komprehensif yang dapat mempercepat penurunan kemiskinan dapat dilihat pada Gambar 3.2.



**Gambar 3.2. Kewirausahaan Komprehensif**

Gambar 3.2. memperlihatkan bahwa kewirausahaan yang dapat menurunkan kemiskinan ialah kewirausahaan komprehensif dimana target penurunannya tidak hanya kemiskinan material saja tetapi juga kemiskinan spiritual.

#### IV. KESIMPULAN

Pencanangan program kewirausahaan pada generasi muda merupakan langkah terbaik sebagai upaya awal dalam penurunan kemiskinan. Hal ini karena generasi muda merupakan calon *entrepreneur* selanjutnya. Pada perkembangannya, kemiskinan sendiri terdapat kemiskinan material dan kemiskinan spiritual. Penyebab kurangnya mental yang terbangun pada *entrepreneur* ialah karena tidak kuatnya spiritual mereka sehingga kurang terdistribusinya modal dari *entrepreneur* kaya ke *entrepreneur* pemula. Oleh karena itu, tidak aneh jika di kewirausahaan Jawa Barat didominasi oleh UMK yang tidak memiliki cukup modal dan pengetahuan untuk mengembangkan usahanya. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar bahwa kewirausahaan yang perlu dikembangkan ialah kewirausahaan yang komprehensif yakni kewirausahaan yang melibatkan aspek spiritual dan material baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasinya sehingga dapat mempercepat penurunan kemiskinan baik kemiskinan spiritual maupun kemiskinan material secara bersamaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Fadhlurrahman. (2017). *Nilai-Nilai Pendidikan Kewirausahaan Dalam Al-Qur'an Di Muhammadiyah Boarding School (Mbs) Purworejo*. Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.

Habib Ahmed (2004). *Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation*. Islamic Development Bank: Jeddah.

<https://bps.go.id>

<https://jabar.bps.go.id>

<https://Jabarprov.go.id>

Islam, A. I., Sobri, A. Y., & Kusumaningrum, D. E. (2015). Manajemen Pendidikan Kewirausahaan Berbasis Produksi. *Manajemen Pendidikan*, 554-562.

Khumairo, A. (2015). *Bimbingan Karir dalam Menumbuhkan Perilaku Kewirausahaan Santri di Pondok Pesantren Entrepeneur Ad-Dhuha Bantul Yogyakarta*. Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.

- Mafruhah, Ade Yunita, Ria Haryatiningsih., & Meidy Haviz. (2016). Solusi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Berdasarkan Perspektif Islam. *Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, 6(1), 134-141.
- Marwanti, S., & Astuti, I. D. (2012). Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Melalui Pengembangan Kewirausahaan Keluarga Menuju Ekonomi Kreatif di Kabupaten Karanganyar. *SEPA*, 134-144.
- Milla, H. (2013). Pendidikan Kewirausahaan: Sebuah Alternatif Mengurangi Pengangguran Terdidik Dan Pencegahan Korupsi. *Jurnal Al-Ta'lim*, 465-47.
- Nugroho, A. J., Haris, A., & Nursito, S. (2016). Model Budaya Wirausaha Berbasis Nilai-Nilai Kewirausahaan Islami. *Seminar Nasional IENACO-2016*, (pp. 601-612).
- Reginald, A. R., & Mawardi, I. (2014). Kewirausahaan Sosial Pada Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. *JESTT*, 333-345.
- Salleh, Muhammad Syukri. (2013). *Concept in Islamic Economics revisited The Case of Poverty*. Malaysia: Universiti Sains Malaysia.
- Siregar, B. G. (2015 ). Peranan Bank Syariah Dalam Mengembangkan Kewirausahaan. *At-Tijarah*, 1-19.
- Wekke, I. S. (2017). Integrasi Pendidikan Islam Dan Pembelajaran Kewirausahaan Di Pesantren Minoritas Muslim. *FENOMENA*, 1-23.
- Yasa, Murjana. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Partisipasi Masyarakat di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT* nov. 2012. Hal 86-91.